



Anggaran Pembelian Buku Naik Fantastis

Pengadaan buku perundang-undangan pada 2016 lalu dihargai Rp 13,5 juta. Sekarang, bandrolnya melesat menjadi Rp 1,47 miliar.

SINGARAJA, NusaBali

Dana pembelian buku pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Bule-

leng, ternyata sudah ada sejak tahun 2016. Namun di tahun 2017, nilainya naik dua kali lipat. Badan Anggaran (Banggar) DPRD Buleleng pun mempertanyakan kenaikan anggaran tersebut.

Anggota Banggar Putu Tirta Adnyana, Selasa (12/7) mengungkapkan, pada tahun 2016, anggaran pembelian buku mencapai Rp 3,31 miliar, mencakup sepuluh jenis buku. Dari dana tersebut, sebanyak Rp 3,2 miliar adalah pengadaan buku naskah, sisanya Rp 13,5 juta untuk pengadaan buku perundang-undangan. Namun pada tahun 2017, alokasi pembelian buku kembali muncul dengan

alokasi dana mencapai Rp 8,01 miliar, yang mencakup seluruh OPD, termasuk kecamatan dan kelurahan. Dana tersebut untuk pengadaan 21 jenis buku.

Menariknya pengadaan buku perundang-undangan naik tajam menjadi Rp 1,47 miliar. "Padahal pada tahun 2016 lalu sudah ada sebesar Rp 13,5 juta. Ada juga anggaran sebesar Rp 674 juta untuk pengadaan buku perpustakaan desa," ungkap politisi Partai Golkar asal Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula ini.

Tirta Adnyana mengaku, anggaran pembelian buku itu ditemukan setelah ia menyisir buku penjabaran APBD 2016

dan APBD 2017. Karena anggaran pembelian buku tidak dibahas secara rinci dalam Perda APBD, karena sifatnya gelondongan.

"Setelah saya buka buku penjabaran baru kelihatan ini. Kalau saat penyusunan APBD, tidak kelihatan. Karena saat buat perda angkanya itu gelondongan. Sedangkan penjabaran itu lewat perbup," kata Tirta Adnyana.

Menurutnya, kenaikan anggaran pembelian buku itu memang patut dipertanyakan. Karena kenaikannya cukup tinggi. Terutama dalam pengadaan buku perundang-undangan. Kenaikannya fantastis, dari se-

mula hanya puluhan juta rupiah menjadi miliaran rupiah.

"Saya baca ada macam-macam jenis buku. Ada 21 jenis buku kalau tidak salah tahun ini. Tapi yang saya heran buku perundang-undangan ini. Kok melonjak cukup besar begini," imbuh politisi yang cukup vocal ini.

Selain itu pihaknya juga akan mempertanyakan kepada eksekutif, siapa rekanan yang akan ditunjuk. Dewan khawatir akan ada penunjukan pada satu atau dua rekanan saja. "Siapa yang melakukan pengadaan dan siapa yang akan ditunjuk. Itu yang ingin kami tanya nanti.

Pengadaan buku itu wajar kok, selama realistis. Tapi kalau kenaikannya sangat tinggi, seperti pengadaan buku perundang-undangan itu, ya jadi tanda tanya," tegasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, anggaran pengadaan buku pada beberapa OPD di Kabupaten Buleleng mendapat sorotan. Pada tahun 2017 ini, ada 14 OPDS yang menganggarkan pembelian buku. Buku yang dibeli pun bermacam-macam, mulai dari buku/kepuustakaan, buku ilmu pengetahuan dan teknologi, buku peraturan perundang-undangan, buku ensiklopedia,

buku perpustakaan desa, dan buku PAUD dan TK.

Masing-masing OPD disebut akan melakukan penunjukan langsung - kecuali Kecamatan Buleleng - karena nilai anggaran masing-masing OPD di bawah Rp 200 juta. Proses ini dianggap rentan karena berpotensi menguntungkan satu atau dua rekanan saja.

Sekkab Buleleng Dewa Ketut Puspaka juga berencana melakukan rasionalisasi anggaran dengan mencoret alokasi belanja buku itu. Alasannya anggaran pemerintah daerah saat ini dalam kondisi defisit, sehingga perlu melakukan efisiensi yang ketat. **k19**

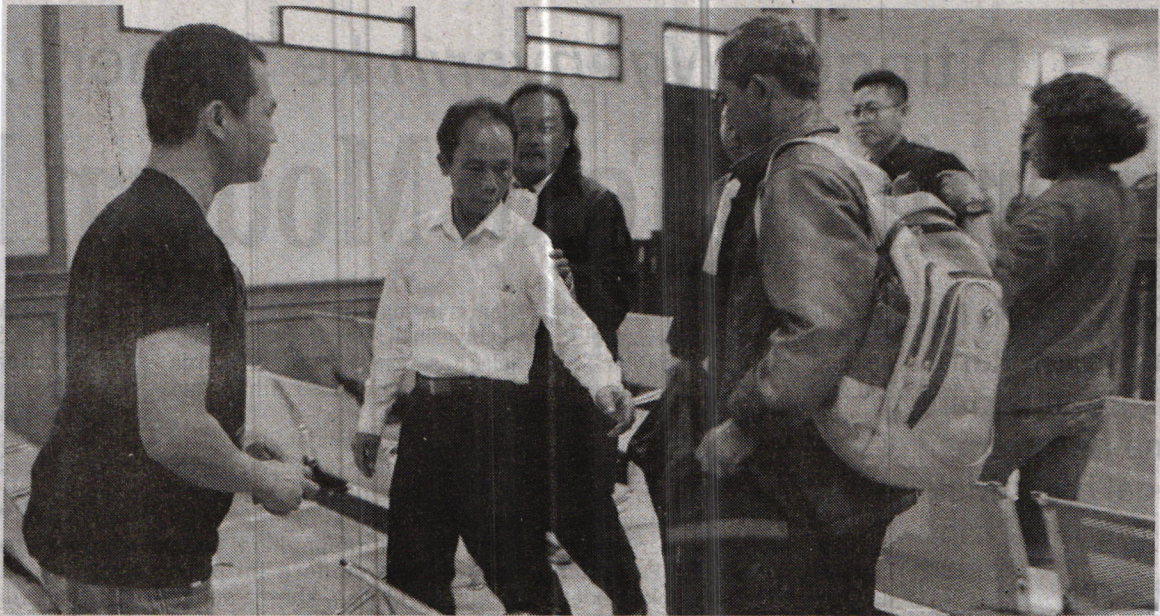
Edisi : Kamis, 13 Juli 2017

Hal : 4



Eks Sekwan Denpasar Dituntut 1,5 Tahun

★ Kasus Dugaan Korupsi Perjalanan
Dinas DPRD Denpasar



TERDAKWA, I Gusti Ngurah Agung Rai Sutha, eks Sekwan DPRD Denpasar usai jalani sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (12/7). ● NUSABALI/YUDA

Rai Sutha sebagai Sekwan bertanggung jawab dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas DPRD Denpasar tahun 2013 yang merugikan negara Rp 2,2 miliar.

DENPASAR, NusaBali

Mantan Seketaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Agung Rai Sutha dituntut hukuman 1,5 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi Perjalanan Dinas (Perdin) DPRD Kota Denpasar. Sidang tuntutan digelar di Pengadilan Tipikor Denpasar pada, Rabu (12/7) mulai pukul 15.00 Wita hingga 15.30 Wita.

Dalam amar tuntutan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dewa Lanang Arya Raharja dkk di hadapan majelis hakim pimpinan Wayan Sukanila menyatakan terdakwa Rai Sutha terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. I Gusti Ngurah Agung Rai Sutha bersama PPTK, I Made Patra (sudah divonis 1 tahun) disebut dalam membuat laporan pertanggungjawaban, tidak berpedoman pada aturan yang ada.

Sehingga setiap ada penagihan dari travel selalu menerima tanpa melakukan verifikasi berapa sesungguhnya biaya yang dikeluarkan untuk tiket pesawat dan penginapan yang diajukan pihak travel. "Selanjutnya pihak Travel PT Bali Daksina Wisata dan PT Sunda Duta Tour and Travel sebagai pelaksana kegiatan memperoleh

Edisi : Kamis, 13 Juli 2017

Hal : 5



Sambutan - - -

keuntungan dari perjalanan dinas anggota dewan ini," tegas Lanang.

Akibatnya dalam perjalanan dinas DPRD Kota Denpasar ini menimbulkan kerugian negara sesuai perhitungan BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) Wilayah Bali sebesar Rp 2,2 mili ar. Akibat perbuatannya, JPU menjerat terdakwa dengan Pasal 3 jo pasal 18 UU RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU RI No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang tipikor jo pasal 64 ayat 1 KUHP, jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Setelah membacakan hal memberatkan, di antaranya tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan hal meringankan, yaitu bersikap sopan selama sidang, JPU membacakan tuntutan. "Memohon kepada majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara selama satu tahun enam bulan," tegas JPU. Hukuman ini ditambah denda Rp 50 juga subisder 3 bulan penjara tanpa dikenakan uang pengganti kerugian negara.

Uang pengganti kerugian negara yang mencapai Rp 2,2 miliar sudah dikembalikan mantan anggota DPRD Kota Denpasar periode 2009-2014. Usai pembacaan tuntutan, kuasa hukum terdakwa, Made Ahmad Hadiyana dan Made Suardika Adnyana langsung menyampaikan pledoi (pembelaan) secara lisan. Dalam pledoi tersebut, memohon kepada majelis hakim untuk membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan JPU. "Namun jika majelis hakim memiliki pendapat lain,

kami mohon agar terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya," ujar Hadiyana.

Sidang akan dilanjutkan pada, Rabu (19/7) mendatang dengan agenda pembacaan putusan. Dalam perkara ini, Rai Sutha sebagai Sekwan dan Pengguna Anggaran (PA) dalam Perdin DPRD Kota Denpasar disebut bertanggung jawab dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas DPRD Kota Denpasar tahun 2013 yang merugikan negara Rp 2,2 miliar. Mantan pejabat di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Bali ini disebut dalam membuat laporan pertanggungjawaban, tidak berpedoman pada aturan yang ada.

Dalam kasus ini, eks PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), I Made Patra sudah divonis bersalah dan dijatuhi hukuman 1 tahun penjara. Kasus ini berawal dari adanya program peningkatan kapasitas lembaga DPRD pada tahun 2013 yang salah satunya terdapat anggaran perjalanan dinas (Perdin). Dalam program ini dianggarkan Rp 12.263.641.875.

Rai Sutha disebut berkoordinasi dengan Gede Wira Kusuma Wahyudi untuk mengkoordinasikan dengan pihak travel, yaitu Sunda Duta Tour dan Travel dan Bali Daksina Wisata. Travel itu kemudian mengajukan paket perjalanan sesuai daerah tujuan perdin DPRD Kota Denpasar. Dalam program yang diikuti hampir seluruh anggota DPRD Kota Denpasar sejumlah 40 orang inilah diduga ada mark up. Disebutkan, akibat perbuatan Rai Sutha telah menyebabkan memperkaya pihak travel agen, yakni Sunda Duta Tour & Travel dan Bali Daksina Wisata dan orang lain, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara Rp Rp 2.292.268.170. rez

Edisi : Kamis, 13 Juli 2017

Hal : 5



Penanganan Air Bersih Buleleng

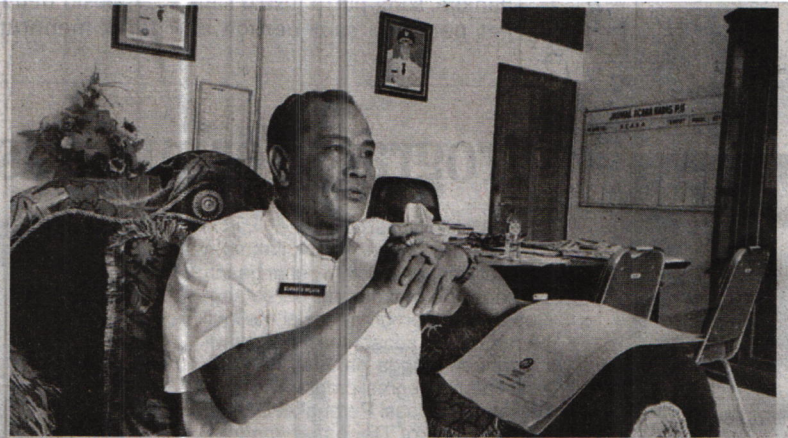
Anggarkan Rp 11 Miliar

SINGARAJA, NusaBali

Polemik air bersih yang sering mencuat menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Buleleng. Terutama di daerah-daerah yang mengalami krisis dan masalah air bersih di musim kemarau. Untuk penanganan air bersih tahun ini Kabupaten Buleleng mengalokasikan dana khusus sebesar Rp 11 miliar.

Besaran anggaran tersebut dikatakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Buleleng Ketut Suparta Wijaya, Rabu (12/7) kemarin akan digunakan untuk mengoptimalkan jaringan air bersih yang sudah ada. Karena menurutnya dari 148 desa dan kelurahan yang ada di Buleleng, hanya 67 desa/kelurahan yang bisa terlayani oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Sedangkan sisanya masih dikelola oleh desa masing-masing yang sebagian besar belum optimal.

"Tahun ini ada beberapa lokasi yang kita akan optimalisasi jaring-



KEPALA Dinas PUPR Buleleng, Ketut Suparta Wijaya.

● NUSABALI/LILIK

gan airnya, karena selama ini banyak terutama pengelolaan di desa yang belum efektif," ujar Suparta.

Dari dana Rp 11 miliar tersebut di antaranya akan dikucurkan untuk pengangkatan sumur bor di Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula dengan menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya

(PLTS) atau solar cell.

Pihaknya pun menyebut program tersebut adalah pilot project, jika berhasil ke depannya akan dikembangkan di daerah lain dengan masalah yang sama. Selain itu juga optimalisasi jaringan perpipaan di Desa Pangkung Paruk, Kecamatan Seririt, Desa Binging

Cina di Kecamatan Busungbiu dan juga di Desa Kerobokan, Kecamatan/Kelurahan Buleleng.

Penanganan air bersih di Buleleng juga menurut Suparta akan dilakukan secara bertahap. Dan ditargetkan tuntas pada tahun 2019 mendatang yang sejalan juga dengan program nasional. Bahkan di tahun 2018 mendatang, penanganan air bersih juga akan dilakukan oleh pemerintah pusat bersama provinsi dengan membuka SPAM Burana yang mengambil air dari bendungan Titab sebanyak 350 liter per detik.

Sebanyak 300 liter di antaranya akan dialirkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih di kawasan Buleleng Barat dan sisanya 50 liter per detik juga menyuplai air di wilayah Gilimanuk, Jembrana. "Ke depannya kami juga akan sasar sumur bor peninggalan proyek air tanah yang berpotensi sekitar 50 sumur bor yang akan kita maksimalkan menggunakan PLTS secara bertahap," ungkap Suparta. **k23**

Edisi : Kamis, 13 Juli 2017

Hal : 4